

Analisis Konflik Struktural Dalam Isu Kekerasan Bersenjata di Papua: Kajian Tentang Peran Institusi Militer, OPM dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM

Nadia Natasya Wonda^{1*}, Lady Imelda Nope¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : nadiannawonda@gmail.com

Article History:

Received : 27-01-2026

Accepted : 08-02-2026

Keywords: Konflik Struktural; Institusi Militer; Organisasi Papua Merdeka; Papua; Otonomi Khusus

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena konflik kekerasan bersenjata di Papua yang telah berlangsung dalam jangka panjang sebagai bentuk konflik struktural yang kompleks. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi peran institusi militer negara (TNI-Polri) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam dinamika keamanan, serta implikasinya terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik bersumber dari ketidakadilan struktural yang terlembaga, seperti marginalisasi masyarakat adat, ketimpangan pembangunan ekonomi yang bersifat Jawa-sentris, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Kehadiran aparat keamanan negara yang cenderung represif dan militeristik di satu sisi, serta perlawanan bersenjata faksi militer OPM di sisi lain, telah menciptakan siklus kekerasan yang memperburuk kondisi keamanan manusia (human security) dan memicu berbagai pelanggaran HAM. Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan otonomi khusus (Otsus) telah diimplementasikan, efektivitasnya dalam meredam konflik masih rendah akibat kegagalan dalam membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat Papua, serta lemahnya penegakan hukum yang adil.

PENDAHULUAN

Papua merupakan wilayah di bagian timur Indonesia yang hingga kini masih menghadapi konflik kekerasan bersenjata yang berlarut panjang. Konflik ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, di mana penyelesaian status Papua Barat ditunda dan menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perkembangannya, persoalan Papua kemudian dibawa ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berujung pada penyerahan otoritas administratif Papua Barat dari Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Proses ini disertai dengan kewajiban pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, yang hasilnya menyatakan Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Meskipun demikian, proses integrasi tersebut hingga kini masih menyisakan kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua.

Konflik merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam setiap sistem sosial, konflik dan integrasi merupakan dua proses yang berjalan

berdampingan sebagai konsekuensi dari perbedaan kepentingan, nilai, dan distribusi kekuasaan. Konflik dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda, yang ditandai oleh ketegangan, ancaman, hingga penggunaan kekerasan. Dalam konteks Papua, konflik kekerasan bersenjata berkembang menjadi salah satu persoalan keamanan dan hak asasi manusia (HAM) paling kompleks dan berkepanjangan di Indonesia. Sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia, dinamika politik, ekonomi, dan identitas etnis terus memengaruhi relasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.

Berbagai studi menunjukkan bahwa konflik di Papua dipicu oleh sejumlah faktor struktural, seperti ketimpangan pembangunan ekonomi, marginalisasi masyarakat adat, perebutan dan eksploitasi sumber daya alam, serta kebijakan keamanan yang cenderung berorientasi militeristik. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan minimnya partisipasi politik masyarakat Papua memperkuat rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap negara. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi konflik struktural yang berkelanjutan dan memicu penggunaan kekerasan bersenjata sebagai sarana perlawanan maupun kontrol keamanan.

Dalam dinamika konflik tersebut, pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi salah satu konsekuensi yang paling menonjol. Berbagai laporan lembaga hak asasi manusia mencatat adanya tindakan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan negara, seperti penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, serta pembatasan ruang sipil. Data dari KontraS (2020) menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2020 terdapat puluhan insiden kekerasan yang melibatkan aparat TNI dan Polri di Papua. Situasi ini menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat dan memperburuk kondisi keamanan manusia (*human security*).

Di sisi lain, Organisasi Papua Merdeka (OPM) hadir sebagai aktor non-negara yang mengekspresikan perlawanan terhadap negara melalui perjuangan politik dan aksi kekerasan bersenjata. Aktivitas OPM, khususnya melalui faksi bersenjatanya, turut berkontribusi terhadap eskalasi konflik dan menciptakan siklus kekerasan yang berkepanjangan. Pertemuan antara kekuatan negara melalui institusi militer dan kelompok perlawanan bersenjata ini menempatkan masyarakat sipil sebagai pihak yang paling rentan dan terdampak.

Konflik kekerasan bersenjata di Papua dengan demikian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pertentangan antara aparat keamanan dan kelompok separatis. Konflik ini merupakan konflik struktural yang berakar pada ketidakadilan yang terlembaga dalam sistem politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Ketimpangan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, serta pembangunan yang tidak sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal memperkuat frustrasi kolektif dan memperdalam konflik. Dampak dari konflik struktural ini tercermin dalam berbagai bentuk pelanggaran HAM, pengungsian internal, serta rusaknya relasi kepercayaan antara negara dan masyarakat Papua.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis mendalam mengenai konflik struktural di Papua menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kekerasan bersenjata di Papua dalam perspektif konflik struktural, dengan menelaah peran institusi militer negara (TNI–Polri) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta dampaknya terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami akar permasalahan konflik Papua secara

lebih komprehensif, sekaligus menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis fenomena konflik struktural dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang bersifat kompleks dan berlarut panjang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika konflik secara mendalam, termasuk relasi kuasa, kebijakan negara, serta pengalaman sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui data kuantitatif semata.

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang mengandalkan data sekunder, berupa laporan organisasi hak asasi manusia, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta sumber sejarah yang relevan. Data dikumpulkan dari literatur yang membahas sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia, dinamika kebijakan otonomi khusus, peran aktor negara dan non-negara, serta dokumentasi peristiwa kekerasan bersenjata dan pelanggaran HAM kontemporer.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris dengan konsep konflik struktural dan keamanan manusia (*human security*). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi pola-pola ketidakadilan struktural, peran institusi militer dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta implikasinya terhadap keberlanjutan konflik dan pelanggaran HAM di Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Struktural di Papua

Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik kekerasan bersenjata di Papua merupakan bentuk konflik struktural yang berakar pada ketidakadilan sistemik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Ketimpangan distribusi sumber daya, keterbatasan akses masyarakat asli Papua terhadap proses pengambilan keputusan, serta pembangunan yang tidak sepenuhnya berpihak pada kebutuhan lokal memperkuat rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap negara. Pemekaran wilayah dan kebijakan pembangunan yang dijalankan negara belum sepenuhnya mampu mereduksi ketegangan, bahkan dalam beberapa konteks justru memunculkan persoalan baru terkait tata kelola, representasi politik, dan distribusi manfaat pembangunan (Galtung, 1969; Viartasiwi, 2018).

Peran Institusi Militer Negara dan Dampaknya Terhadap HAM

Institusi militer negara, khususnya TNI dan Polri, memainkan peran sentral dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang cenderung militeristik dan represif sering kali berdampak pada meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berbagai laporan organisasi HAM mencatat terjadinya penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, serta pembatasan ruang sipil yang melibatkan aparat keamanan. Kondisi ini tidak hanya memperburuk situasi keamanan manusia (*human security*), tetapi juga memperdalam jarak sosial dan psikologis antara negara dan masyarakat Papua (KontraS, 2020; Amnesty International, 2021).

Organisasi Papua Merdeka sebagai Aktor Non-Negara Dalam Siklus Kekerasan

Di sisi lain, Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul sebagai aktor non-negara yang mengekspresikan perlawanan terhadap negara melalui jalur politik dan kekerasan bersenjata.

Aktivitas faksi militer OPM, termasuk serangan terhadap aparat keamanan, infrastruktur publik, dan warga sipil, turut memperpanjang siklus kekerasan di Papua. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh OPM tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil. Interaksi antara kekuatan negara dan kelompok perlawanan bersenjata ini menciptakan dinamika konflik yang bersifat resiprokal dan berkelanjutan (Al Hasyim, 2017; Pedrason, 2021).

Kesenjangan Sosial-Ekonomi sebagai Akar Konflik

Hasil kajian pustaka memperlihatkan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan salah satu akar utama konflik struktural di Papua. Meskipun Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya tersebut tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Kelompok masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat sering kali terpinggirkan dalam sistem ekonomi dan pembangunan. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya tata kelola, korupsi, serta kebijakan yang tidak sensitif terhadap konteks sosial-budaya Papua, sehingga memperkuat frustrasi kolektif dan potensi konflik (Sitorus, 2021; Kaisupy, 2021).

Dimensi Internasional dan Tantangan Penanganan Konflik

Konflik Papua juga memiliki dimensi internasional yang tercermin dalam meningkatnya perhatian lembaga dan organisasi HAM internasional terhadap situasi di wilayah ini. Berbagai tuntutan untuk meninjau kembali pendekatan keamanan dan mendorong penyelesaian konflik secara damai menunjukkan adanya persepsi global bahwa pendekatan negara belum sepenuhnya efektif. Meskipun demikian, keterlibatan aktor internasional belum mampu menghasilkan solusi konkret yang berkelanjutan, karena penyelesaian konflik masih sangat bergantung pada komitmen negara dalam membangun kepercayaan, menegakkan hukum secara adil, dan mengatasi ketidakadilan struktural (Febrianti, 2019; Amnesty International, 2022).

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa konflik kekerasan bersenjata di Papua tidak dapat dipahami secara sempit sebagai persoalan separatisme atau keamanan semata. Konflik ini merupakan manifestasi dari ketidakadilan struktural yang telah terlembaga dan direproduksi dalam berbagai kebijakan dan praktik negara. Peran institusi militer dan OPM, meskipun berada pada posisi yang berlawanan, sama-sama berkontribusi terhadap eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM, dengan masyarakat sipil sebagai pihak yang paling terdampak. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menekankan aspek keamanan, tetapi juga reformasi struktural dalam bidang politik, ekonomi, dan penegakan HAM (Galtung, 1969; Sefriani, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik kekerasan bersenjata di Papua merupakan konflik struktural yang berakar pada ketimpangan distribusi kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, serta kebijakan pembangunan yang bersifat Jawa-sentris. Kondisi tersebut mendorong munculnya perlawanan politik dan bersenjata oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), baik melalui faksi politik seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) maupun faksi militer seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Di sisi lain, kehadiran institusi militer negara (TNI–Polri) yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan sering kali dikaitkan dengan pendekatan represif dan praktik pelanggaran hak asasi manusia, seperti penembakan dan penganiayaan. Interaksi antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata OPM telah menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan, dengan masyarakat sipil sebagai pihak yang paling terdampak.

Dampak konflik struktural ini terlihat dalam pengungsian massal, stigma sosial terhadap masyarakat Papua, serta rendahnya efektivitas kebijakan otonomi khusus dalam mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang dominan dan praktik separatisme bersenjata belum mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik, terutama marginalisasi masyarakat adat dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan berkelanjutan yang menekankan dialog dua arah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil Papua, disertai dengan pemerataan pembangunan serta penegakan hukum yang adil. Pendekatan non-militeristik yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan kepercayaan menjadi prasyarat penting untuk memutus siklus kekerasan dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amnesty International. (2018). *Indonesia: Human rights abuses in Papua*. Amnesty International Report.
- [2] Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. London: Verso.
- [3] Elmslie, J., & Webb-Gannon, C. (2013). A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua. *Griffith Journal of Law & Human Dignity*, 1(2), 142–166.
- [4] Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- [5] International Crisis Group. (2019). *Indonesia: The worsening conflict in Papua*. Asia Report.
- [6] KontraS. (2020). *Laporan tahunan pelanggaran HAM di Papua*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.
- [7] McGibbon, R. (2004). *Plural society in peril: Migration, economic change, and the Papua conflict*. Canberra: Australian National University.
- [8] Mursitama, T. N., & Dewanto, P. A. (2020). *Dinamika Konflik di Papua*. Universitas Bina Nusantara (BINUS). <https://ir.binus.ac.id/files/2020/10/Konflik-Papua-fin.-1.pdf>
- [9] Saifuddin, A. F. (2005). Menuju Antropologi yang Relevan: Isu-isu Profesionalisme dan Metodologi Antropologi di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 29(1), 1-15. <https://scholarhub.ui.ac.id/jai/vol29/iss1/1>
- [10] Sari, D. S., & Marom, A. (2024). Analisis konflik dan masalah sosial di Papua: Upaya penyelesaian dengan menelusuri akar konflik dan masalah. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 4(1), 32–46. <https://doi.org/10.33830/humaya.v4i1.5309>
- [11] United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2022). *Situation of human rights in Papua and West Papua*. OHCHR Report.

- [12] Widjojo, M. S., et al. (2009). *Papua road map: Negotiating the past, improving the present and securing the future*. Jakarta: LIPI.
- [13] World Bank. (2020). *Indonesia: Addressing inequality and social exclusion in Papua*. World Bank Report.